007.001

ORTI BALI

Media Komunikasi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Edisi XX (Februari - April 2014)

Salam Redaksi

Om Swastyastu

Dalam rangka menjaring awareness pengawasan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, BPK RI telah mengadakan serangkaian kegiatan yang juga berfungsi sebagai sosialisasi visi dan misi BPK. Dengan diadakannya talkshow yang membahas tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah secara online pada PT BPD Bali, digelarnya acara nonton bersama film yang diangkat dari hasil pemeriksaan BPK dan kunjungan ke media massa adalah segelintir dari rangkaian kegiatan tersebut.

Dengan demikian, diharapkan agar kesadaran untuk bersama-sama mengawasi tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah semakin meningkat dan praktek penyelewengan uang negara bisa ditekan serendah mungkin.

Om Shanti Shanti Shanti Om

DAFTAR ISI

BPK Sepakati Cara Mengakses Data Transaksi Rekening Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Dan PT BPD Bali ..... Hal 1

Pelaksanaan Intosai Working Group On Key National Indicators (WGKNI) ..... Hal 2

Bpk Kembali Pantau Penyerahan BSM ..... Hal 2

Pemutaran Film BPK : Sarana Tepat Mengedukasi Masyarakat ..... Hal 3

BPK RI Dan Unud Gelar Forum Ilmiah Tentang Peran BUMD ..... Hal 3

Penyerahan LHP Triwulan IV Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali ..... Hal 4

Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional ..... Hal 4

Upacara Melaspas ..... Hal 5

Info Pariwisata ..... Hal 5

Galery Foto ..... Hal 6 - 7

Ucapan Selamat ..... Hal 8

BPK SEPAKATI CARA MENGAKSES DATA TRANSAKSI REKENING DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI DAN PT BPD BALI

Denpasar, Februari 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan 9 kabupaten/kota di wilayah provinsi Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara online pada PT BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Arman Syifa, dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, dan Direktur Utama PT BPD Bali, I Made Sudja, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, pada 4 Februari 2014. Kegiatan ini disaksikan olehKetua BPK, Hadi Poernomo, Anggota BPK, Rizal Djalil, dan Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika. Acara ini dihadiri dan disaksikan pula oleh para pejabat di lingkungan BPK, forum komunikasi pimpinan daerah, pemerintah daerah se-provinsi Bali dan PT BPD Bali. Sebelumnya, BPK telah melakukan penandatanganan serupa dengan pemerintah provinsi Bali pada 21 Januari 2014 di kantor pusat BPK, Jakarta dan dengan beberapa pemerintah provinsi lainnya.

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara BPK dengan Pemerintah se-Provinsi Bali dan PT BPD Bali dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pelaksanaan INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI)

Kuta, Februari 2014

BPK RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan ke-7 INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI). Acara yang digelar di Sahid Ballroom Hotel Sheraton, Kuta, Bali pada 25 Februari 2014 ini diikuti oleh 15 negara anggota INTOSAI yaitu Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.

Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI (Hadi Poernomo). Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menjelaskan bahwa tujuan INTOSAI WGKNI adalah untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam menilai efisiensi dan efektivitas dari sumber daya nasional, serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI dalam menyusun dan menggunakan key national indicators (indikator-indikator kunci nasional).

"Kelompok kerja ini mempertimbangkan untuk membantu pemerintah nasional meningkatkan efisiensi, transparansi, kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta mengkaji keefektifan sumber daya nasional demi kepentingan negara dan masyarakat," papar Ketua BPK dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI (Hasan Bisri), Anggota BPK RI (Sapto Amal Damandari), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas (Armida Alisjahbana), Gubernur Bali (Made Mangku Pastika), serta Ketua INTOSAI WGKNI (Tatiana Manuylova).

Seperti diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, di Indonesia model Key National Indicators telah dikembangkan sejak tahun 1970-an dan digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) – 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut digunakan Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Key national indicators harus didefinisikan dengan baik agar tidak membuat suatu pembangunan sulit diukur dan sulit dievaluasi," jelasnya.

BPK KEMBALI PANTAU PENYERAHAN BSM

Badung, Maret 2014

BPK RI kembali melakukan pemantauan atas penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Selasa, 4 Maret 2014. Penyerahan BSM dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Achmad Jazidie) kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA dan SMK. Acara yang mengambil tempat di GOR Purna Krida Kerobokan Badung ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI (Rizal Djalil), Anggota III BPK RI (Agus Joko Pramono), Anggota Komisi I DPR RI (Puan Maharani), Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya), Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (Eddy Mulyadi Soepardi), Wakil Gubernur Bali (I Ketut Sudikerta), Sekretaris Daerah Kabupaten Badung (Kompyang R. Swandika), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bali, Komite Sekolah dan ribuan siswa.

Wakil Gubernur Bali menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan acara ini. "BSM merupakan wujud perhatian kepada siswa Indonesia yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemantauan yang dilakukan BPK merupakan aktualisasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Dirjen Pendidikan Menengah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali atas komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan karena telah mengalokasikan anggaran pendidikan >20%. Lebih lanjut, Dirjen Pendidikan Menengah berpesan kepada para siswa agar menjadi siswa yang rajin belajar. "Tugas kalian hanya satu, belajar untuk menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Jangan pikirkan tentang biaya karena pemerintah sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk kalian," ujarnya disambut gemuruh tepuk tangan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa pemantauan DPR RI bersama BPK bertujuan agar beasiswa ini bisa sampai ke tangan yang membutuhkan. "Dengan demikian, wajar (wajib belajar) tidak hanya 9 tahun tetapi bisa dilaksanakan menjadi 12 tahun," harapnya.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI menyatakan bahwa BSM merupakan bantuan yang paling akuntabel karena dana langsung masuk ke rekening penerima bantuan "BPK menjamin dan memastikan dana tersebut sampai ke tangan yang berhak," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI dalam sambutannya menyatakan sangat mendorong hal yang paling dibutuhkan oleh sebuah negara, yaitu pendidikan dan kesehatan. "Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berpendidikan dan sehat. Saya akan memastikan Bali mendapat apa yang menjadi hak setiap warga negaranya yaitu pendidikan," ujarnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat bantuan dari Kemdikbud yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Bali, dilanjutkan dengan penyerahan BSM secara simbolis oleh Anggota Komisi I dan Anggota Komisi XI DPR RI kepada perwakilan siswa siswi SD, SMP, SMA, SMK.

PEMUTARAN FILM BPK : SARANA TEPAT MENGEDUKASI MASYARAKAT

Kuta, Februari 2014

BPK RI menggelar acara nonton bersama pemutaran tiga film pendek yang terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Setelah ditayangkan di Jakarta dan Medan, Bali menjadi kota ketiga yang dipilih sebagai tempat penayangan film berjudul Uang Rujak Emak, Kertas si Omas dan Cerita Kami. Acara penayangan film yang digelar pada Selasa, 4 Februari 2014 ini dihadiri oleh Ketua BPK RI (Hadi Poernomo), Auditor Utama Keuangan Negara VI (Sjafrudin Mosii), Sekretaris Jenderal BPK RI (Hendar Ristriawan), Kepala Perwakilan Provinsi Bali (Arman Syifa), artis film (Lukman Sardi dan Astri Nurdin), para Bupati di Provinsi Bali, Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan para kepala satuan kerja pemerintah daerah di Provinsi Bali.

"Film pendek ini dibuat sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Nilai-nilai yang diangkat adalah nilai

transparansi, nilai akuntabilitas dan bagaimana masyarakat bisa menyadari nilai-nilai yang harus ditaati sehingga masyarakat bisa menghindari budaya jalan pintas untuk mendapatkan layanan," jelas Sekjen BPK RI dalam acara yang mengambil tempat di Beachwalk XXI Cineplex Kuta, Bali tersebut. Lebih lanjut Sekjen BPK RI menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam film pendek tersebut adalah pelayanan ibadah haji, pengelolaan TKI dan dana BOS. Proses pembuatan film dilakukan sejak April 2013, dengan dukungan USAID, melalui proyek yang dikelola oleh Management System Internasional (MSI), production house PUPUK.

Lukman Sardi selaku salah satu aktor dalam film tersebut turut menyampaikan kesannya. "Film merupakan sarana tepat dalam mengedukasi masyarakat mengingat film merupakan media yang mudah diterima," ujarnya. Dalam sambutannya, putra dari Idris Sardi ini berharap agar cerita dalam film ini bisa menginspirasi masyarakat luas dan memupuk rasa peduli terhadap sekitar dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.

BPK RI DAN UNUD GELAR FORUM ILMIAH TENTANG PERAN BUMD

Jimbaran, Maret 2014

BPK RI bekerjasama dengan Universitas Udayana (Unud) menggelar forum ilmiah bertemakan "Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pembangunan" yang disampaikan oleh Anggota BPK RI (Dr. H. Rizal Djalil) pada Senin, 17 Maret 2014. Acara yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali (Made Mangku Pastika), para Forkominda Bali, para Rektor se-Indonesia Bagian Timur, para Bupati/Walikota se-Bali, Effendi Gazali, Ph.D (pakar Komunikasi Politik) dan para pejabat di lingkungan BPK RI Pusat dan Perwakilan Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Udayana (Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD. KEMD) menyambut baik terselenggaranya acara ini. Menurutnya, forum ilmiah ini merupakan wujud pengembangan informasi untuk mendapatkan pencerahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Acara ini merupakan suatu pertemuan penting yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan transparansi akuntabilitas keuangan daerah," katanya di hadapan para dosen dan ribuan mahasiswa. Lebih lanjut, Rektor Unud mengharapkan agar BUMD dapat membuka lapangan kerja baru dan mampu berperan sebagai stimulan penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Bali memaparkan mengenai kondisi BUMD di Provinsi Bali. "Dalam penganggaran, investasi untuk BUMD mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, pendapatan BUMD belum secara signifikan dan optimal memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. Lebih lanjut, Gubernur Bali mengharapkan dukungan berbagai pihak, terutama dari aspek regulasi pemanfaatan aset dalam upaya meningkatkan peran BUMD.

Anggota BPK RI dalam paparannya mengungkapkan beberapa alasan pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan acara forum ilmiah ini yaitu pertama, karena Bali dinilai Anggota BPK sebagai sebuah provinsi yang mengutamakan kebudayaan. Kedua, Anggota BPK menilai Bali merupakan contoh sebuah daerah yang kontribusi BUMD-nya (khususnya BPD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) paling signifikan di kawasan Nusa Tenggara. Ketiga, karena Anggota BPK sangat mencintai Bali. Menurut Anggota BPK, meskipun belum maksimal, kontribusi BUMD Bali untuk PAD adalah yang paling baik di kawasan Nusa Tenggara. "BUMD selain berfungsi menambah pundi PAD juga berfungsi sebagai pelayanan publik. Tetapi sejauh ini berbagai masalah masih membelit BUMD, diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya masalah kontribusi ke PAD serta kesalahan dalam pengelolaan," papar Anggota BPK.

PENYERAHAN LHP TRIWULAN IV TAHUN 2013 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI

Denpasar, Februari 2014

BPK RI kembali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Senin, 10 Februari 2014. Mengambil tempat di Ruang Kerjanya, Kepala Perwakilan Provinsi Bali (Arman Syifa) berturut-turut menyerahkan LHP kepada 4 entitas yang diperiksa. Pada kesempatan pertama, LHP Kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame (PHRR) pada Pemerintah Kota Denpasar TA 2012 dan 2013 (semester I) diserahkan Kepala Perwakilan kepada Wakil Walikota Denpasar (I Gusti Ngurah Jaya Negara) dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar (I Wayan Mariyana Wandhira).

Selanjutnya Kepala Perwakilan menyerahkan LHP Kinerja atas Pengelolaan PHRR TA 2012 dan 2013 (Semester I) serta LHP atas Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Badung kepada Bupati Badung (Anak Agung Gde Agung) dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung (I Made Sunartha). Siangnya, LHP atas Belanja Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Bali serta LHP Kinerja atas Efektivitas Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Bali diserahkan Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRD Provinsi Bali (A.A. Ngurah Oka Ratmadi), Sekda Provinsi Bali (Cokorda Ngurah Pemayun), Ketua KPUD Provinsi Bali (Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi) dan Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi Bali (I Putu Suarta). Selanjutnya, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura kepada Wakil Bupati Karangasem (I Made Sukerana) dan Ketua DPRD Kabupaten Karangasem (I Gede Dana).

Keesokan harinya, Selasa, 11 Februari 2014, Kepala Unit Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (Yohannes Manuputty) menyerahkan LHP kepada Wakil Bupati Buleleng (Nyoman Sutjidra) dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng (Gede Dharma Widjaya) berupa LHP atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja.

SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Denpasar, Februari 2014

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kepada seluruh pegawai, Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan sosialisasi JKN pada Selasa, 11 Februari 2014. Sosialisasi yang dilaksanakan di auditorium kantor perwakilan ini dibuka oleh Kepala Sub Bagian SDM (Hidiyah Rupiyanti) dan diikuti oleh seluruh pegawai Perwakilan Provinsi Bali.

Gusti Ngurah Catur Wiguna selaku narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar memaparkan bahwa penyelenggara dari JKN adalah PT Askes (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. "Jika PT Askes di bawah Menteri BUMN semula hanya memberikan jaminan kesehatan untuk PNS dan pensiunan, TNI/POLRI, perintis kemerdekaan dan veteran, maka BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut G.N. Catur Wiguna menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran peserta BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, besaran iuran jaminan kesehatan serta manfaat jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan berjenjang.

Upacara Melaspas

Melaspas wajib dilakukan bagi umat Hindu yang telah selesai mendirikan rumah tinggal, bangunan suci (pura, merajan, dll), hotel, kantor, toko bahkan kandang. Upacara melaspas bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan bangunan secara niskala sebelum digunakan atau ditempati sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian bagi anggota keluarga yang tinggal di bangunan tersebut serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Melaspas dalam bahasa Bali memiliki kata Mlas artinya Pisah dan Pas artinya Cocok. Penjabaran arti Melaspas yaitu sebuah bangunan yang dibuat dari unsur yang berbeda, ada kayu, tanah (bata) dan batu kemudian disatukan hingga terbentuklah bangunan yang layak (cocok) untuk ditempati.

Sebelum dilakukan upacara Melaspas, dilakukan terlebih dahulu mecaru (nedunang bhutakala, menghaturkan labaan, mengembalikan ke tempatnya masing-masing). Selanjutnya baru dilakukan upacara Melaspas. Rangkaian upacara melaspas sebagai berikut : 1) Mengucapkan orti pada mudra bangunan, 2) Memasang ulap ulap yang ditulis dengan hurup rajahan pada bangunan, 3) Bila bangunan tersebut tempat suci maka dasar bangunan digali lubang untuk tempatkan pedagingan, kalau bangunan utama diisi pedagingan pada puncak dan madya juga, pada bagian puncak diisi padma dari emas, 4) Pangurip urip, arang bunga digoreskan pada tiap - tiap bangunan (melambangkan Tri Murti, Brahmana, Visnu, Iswara), sehingga umat Hindu Bali percaya bahwa bangunan yang didirikan tersebut mempunyai daya hidup, 5) Ngayaban banten ayaban dan ngayaban pras pamlaspas yang didahului memberikan sesajen pada sanggah surya (batang bambu yang menjulang tinggi), 6) Ngayaban caru prabot, 7) Ngeteg-Linggih. Bila yang di Melaspas adalah tempat suci (palinggih), lalu upacaranya di tingkat madya dan nistaning utama bisa dilaksanakan sekaligus. (Drs.I Nyoman Singgih Wikarman)

Kesimpulannya, Upacara Melaspas dilakukan bertujuan untuk memohon kepada Hyang Widhi Wasa agar bangunan yang akan ditempati diberikan anugerah keselamatan dan kerahayuan bagi semua yang ada didalamnya.

Sumber : http://paduarsana.com, foto : dok ORTI Bali

Info Pariwisata

Tulamben : Surganya Para Penyelam

Tulamben adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Nama Tulamben berasal dari batulambih, yang berarti "banyak batu", merujuk pada letusan Gunung Agung yang mempengaruhi tempat ini dari waktu ke waktu. Nama ini berubah menjadi Batulamben, dan akhirnya Tulamben.

Desa ini adalah salah satu tempat rekreasi penyelaman yang terkenal di Bali, terutama di sekitar lokasi karam kapal USS Liberty (sebuah kapal angkut tentara angkatan darat Amerika Serikat yang tenggelam setelah diterjang torpedo kapal selam Jepang pada tahun1942). Lokasi penyelaman ini adalah salah satu tempat rekreasi penyelaman termudah. Penyelam dari semua tingkatan keahlian bisa melakukan penyelaman di tempat ini. Lokasi ini bisa dicapai langsung dari bibir pantai dan terletak sekitar 25 meter dari pesisir, dengan kedalaman antara 5 - 30 meter di bawah permukaan laut. Tulamben menawarkan kemudahan penyelaman dan kekayaan biota laut mulai dari yang kecil seperti siput laut, kepiting dan udang, ghost pipefish dan pygmy seahorse sampai yang besar seperti hiu, ikan Mola mola, dan lain lain.

Tulamben juga merupakan situs penyelaman yang sesuai untuk kursus penyelaman, penyelaman santai (fun dive) dan fotografi bawah air. Selama musim liburan, lebih dari 100 penyelam mendekati bangkai kapal ini tiap hari.

Beberapa situs penyelaman yang ada di Tulamben adalah Bangkai kapal USS Liberty, Tulamben Wall (Drop Off), Matahari Reef, Suci's Place, Paradise Reef, Seraya dan Kubu.

Artikel : id.wikipedia.org dan www.divetulamben.com

Foto : outforvacation.com, balivillastours.com, awesomemoon.com

GALLERY FOTO

Pertemuan Kepala Perwakilan (Arman Syifa) dengan Kapolda Bali pada 3 Februari 2014

Ketua BPK RI (Hadi Poernomo) dan Gubernur Bali (Made Mangku Pastika) menjadi narasumber talkshow mengenai e-audit yang ditayangkan di TVRI Bali pada 25 Februari 2014

Suasana perayaan HUT Kota Denpasar yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan (Arman Syifa) pada 27 Februari 2014

Pegawai Perwakilan Provinsi Bali mengikuti upacara piodalan di pura kantor sekaligus upacara melaspas gedung baru pada 14 Februari 2014

Kunjungan Anggota BPK RI (Ali Masykur Musa) ke Surat Kabar Pos Bali pada 18 Februari 2014

Setelah membuka pertemuan ke-7 INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI), Ketua BPK RI (Hadi Poernomo) melakukan media visit ke Harian Bali Post pada 25 Februari 2014

GALLERY FOTO

Syukuran Ulang Tahun Kepala Perwakilan (Arman Syifa) pada 4 April 2014

Pelaksanaan ASEANSAI Instructors' Design Meeting (IDM) for The Course Design and Instructional Techniques (CDIT) Workshop pada 17-28 Maret 2014

nowledge Transfer Forum (KTF) investigatif audit yang dihadiri oleh seluruh auditor Perwakilan Provinsi Bali pada 28 Maret 2014

Pertemuan Ketua BPK terpilih (Rizal Djalil) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali pada 25 April 2014

Kepala Perwakilan (Arman Syifa) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan audit LKPD atas.. Pemerintah Kabupaten Gianyar TA 2013

Syukuran Ulang Tahun Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas (Djatu Apriellia) pada 17 April 2014

Segenap Pimpinan dan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Mengucapkan

SELAMAT HARI PASKAH 2014

RAHAJENG RAHINA SARASWATI & PAGERWESI 2014

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU

16 APRIL 2014
NI LUH PUTU SHINTA ARYSUTA
&
I NYOMAN SUGIASTIKA
(Staf Sub Bagian Umum)

22 FEBRUARI 2014
AYU APRILLIA PARAMITHA KRISNAYANA PUTRI
(Staf Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan)
&
ADE ISKANDAR ZULKARNAEN

22 DESEMBER 2013
TRI RETNO KUSUMANINGRUM
&
ADE FERDIANA
(Staf Sub Bagian Umum)

TIM REDAKSI
Pengarah : Arman Syifa
Penanggung Jawab : Ida Bagus Ketut Wisnu
Ketua : Djatu Apriellia
Sekretaris : Bevy Kartikasari
Anggota : Ika Seviani Puji Lestari
Budi Yanto
I Gusti Agus Agung Brahmarawan
I Gusti Agung Istri Agung
Ade Ferdiana

Alamat Redaksi :
Jalan D.I. Panjaitan No. 2, Renon, Denpasar 80000
Telepon : (0361) 229193, Faximile : (0361) 229184, 256205
e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com
Website : denpasar.bpk.go.id